

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD sebagai Bagian Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu SKPD berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Agam merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (controlling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting).

Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Agam disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Agam.
6. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2020 tentang Rancangan Kerja Pembangunan Daerah Agam Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Agam ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Agam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2020 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan mengenai :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Propinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2018 terdiri dari 3 program dan 25 Kegiatan, dengan total Anggaran Rp. 26.771.921.750,- dapat direalisasikan Rp.23.731.250.347,- sampai dengan Desember 2018 disediakan anggaran untuk biaya langsung Rp. 2.675.611.690,- terealisasi Rp.2.651.419.179,-.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.990.087.600,-. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.730.957.509,- atau 93 %. Pada pelaksanaan program ini seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran Rp.644.974.000,- realisasi sebesar Rp.625.667.138,- terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas dengan anggaran Rp. 43.650.000,- terealisasi Rp. 34.242.000,- atau (98%).Target kinerja tercapai 100% yang direncanakan dengan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah Jabatan/dinas.
- b. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dengan anggaran Rp. 72.425.000,- terealisasi Rp.72.095.000,- atau 99 %.Target kinerja tercapai 100% dengan selesainya perencanaan pembangunan rumah dinas/jabatan.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran Rp.429.000.000,- terealisasi Rp.427.875.130,-.Realisasi 99,73 % dari target kinerja tercapai 100% sesuai dengan yang direncanakan, dengan telah selesainya pekerjaan Rehab Lobi Kantor.
- d. Pengadaan sarana prasarana dengan anggaran Rp.99.899.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.91.455008,- atau 91% target kinerja tercapai 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini terdiri atas 15 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.22.136.860.150,- Dari jumlah anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp. 19.374.625.700,- sampai Desember atau 90,6 %. Pada pelaksanaan program ini, pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut, yakni :

- a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran Rp. 2.773.510.250,- terealisasi sebesar Rp. 1.985.426.403,- atau 71 % dari dana yang tersedia. Target kinerja tercapai 100% melalui kegiatan 2 pansus (Pansus Tatib DPRD dan Pansus Potensi Pendapatan Daerah dari Pemamfaatan Sumber Daya Air, dan 2 buah Perda Inisiatif yaitu 2 Perda Inisiatif Komisi I, 2 Laporan Pansus lainnya dan 5 Perda dari Pemerintah Daerah Disamping itu kegiatan ini juga menghasilkan 4 kesepakatan.
- b. Kegiatan hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/Tokoh agama, dengan anggaran Rp. 77.579.000,- terealisasi Rp.14.551.700,-, atau 18 %. Kegiatan ini sifatnya menunggu agenda kegiatan DPRD dan undangan yang datang untuk DPRD. Target Kinerja tercapai 100% dimana kegiatan hearing terfasilitasi dengan baik sebanyak 23 kali.
- c. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan, dengan anggaran Rp. 129.164000,- terealisasi sebesar Rp. 109.104.900,- atau 84 %. dimana 76 kali kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan telah difasilitasi, kecuali rapat-rapat yang ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya, hal tersebut diluar kewenangan Sekretariat DPRD.
- d. Kegiatan rapat-rapat paripurna, dengan anggaran Rp.65.896.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.841.000,- atau 75 %. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja bulanan DPRD dan 45 kali kegiatan rapat-rapat paripurna pada prinsipnya telah difasilitasi melalui kegiatan ini.
- e. Kegiatan reses, dengan anggaran Rp. 602.854.000,- terealisasi sebesar Rp. 580.195.500,- atau 96 % dari anggaran tersedia. Kegiatan ini direncanakan untuk 3 kali reses dan terlaksana 3 kali sesuai dengan rencana.
- f. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dengan anggaran Rp.79.686.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.592.250,- atau 27 %. Dalam pelaksanaannya tidak tercapai 100% karena padatnya agenda lain.
- g. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan anggaran Rp. 2.750.301.250,- terealisasi sebesar Rp.2.635.555.824 ,- atau 95%. Target kinerja kegiatan ini tercapai 100% dalam bentuk bimtek/workshop yang diikuti sebanyak 6 kali oleh pimpinan dan anggota DPRD

- h. Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dengan anggaran Rp.95.850.000,- terealisasi sebesar Rp.89.020.000,- atau 92 % target yang direncanakan tercapai dengan 1x General Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD.
- i. Kegiatan pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD, dengan anggaran Rp. 441.542.500,- terealisasi sebesar Rp.441.497.500,- atau 99 %. Target kinerja kegiatan ini tercapai 100% dengan pengadaan pakaian dinas sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap anggota DPRD.
- j. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah, dengan anggaran Rp. 8.089.497.700,- terealisasi sebesar Rp.7.634.017.050,- atau 94 %. Target kinerja kegiatan ini 100% melalui berbagai kunjungan kerja daerah sesuai yang telah dijadwalkan baik melalui alat kelengkapan DPRD.
- k. Kegiatan publikasi dan Informasi kegiatan DPRD, dengan anggaran Rp.323.067.000,- terealisasi sebesar Rp. 317.008.690,- atau 98 %. Target kinerja kegiatan ini tercapai 100% dengan terdokumentasinya seluruh kegiatan DPRD selama tahun 2018 yaitu sebanyak 960 kali.
- l. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran Rp.4.245.119.450,- terealisasi sebesar Rp.3.413.170.743,- atau 80 % sampai Desember 2018 target kinerja kegiatan ini tercapai 90 % dengan masih ada Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan ini disebabkan agenda DPRD yang sangat padat.
- m. Kegiatan Dokumentasi kegiatan DPRD dan Penyediaan Bahan Bacaan dengan anggaran Rp. 341.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 320.765.490,- atau 93 %. Target kinerja kegiatan ini tercapai 100% dengan terpublikasi dan terdokumentasinya seluruh kegiatan DPRD selama tahun 2018
- n. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Persidangan DPRD ,dengan anggaran Rp. 97.537.500,- terealisasi sebesar Rp.71.272.500,- atau 73 % .Target kinerja kegiatan ini tercapai 100%.
- o. Kegiatan Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan dengan anggaran Rp.2.023.430.500,- terealisasi sebesar Rp.1.691.606.150,- atau 83%.Target kegiatan ini tercapai dengan terlaksananya 2 Pansus LKPJ Belanja dan Pendapatan ,serta terlaksananya 7 x rapat Pembahasan APBD Perubahan dan 7x Rapat Pembahasan APBD 2019.

(Sub Bab ini disajikan dalam format Tabel T-C 2.9 terlampir)

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Agam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat Daerah s/d 2019			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
20	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon	168,000,000	146,200,937	526,100,000	478,692,076	90,98	354,000,000	978,893,013	580%
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	128,088,000	126,701,766	96,359,400	95,400,056	99%	98,495,400	320,597,222	250%
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terwujudnya Singkronisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.	443,485,000	342,209,239	997,879,000	975,382,729	97%	1,147,922,000	2,465,513,968	510%
		20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional jasa perkantoran.	425,484,300	443,568,885	528,351,200	517,226,895	97%	516,139,500	1,476,935,280	340%
		21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Lancarnya operasional perkantoran.	1,374,756,960	1,265,929,013	1,552,365,500	1,383,158,158	89%	1,744,081,000	4,393,168,171	310%

		28	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan	315,313,000	304,833,910	289,032,500	281,097,595	97%	275,656,000	861,587,505	270%
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhiya peralatan rumah dinas	152,300,000	164,860,310	43,650,000	34,242,000	78%	63,650,000	262,752,310	170%
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif.	945,637,500	921,886,575	429,400,000	427,875,130	99%	500,000,000	1,849,761,705	190%
		46	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana kantor.	374,000,000	867,886,481	99,899,000	91,455,008	91%	160,175,000	1,119,516,489	290%
		53	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	Tersedianya rumah jabatan yang representatif.	100,000,000	98,920,000	72,425,000	72,095,000	99%	-	171,015,000	170%
	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
		01	Pembahasan Ranperda	Tersedianya produk hukum daerah	5,999,144,800	4,035,612,875	2,773,510,250	1,985,426,403	71%	2,979,394,200	9,000,433,478	150%
		02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Tercapainya Intensitas Komunikasi dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat.	100,816,400	27,149,739	77,579,000	14,551,700	18%	93,452,500	135,153,939	130%
		03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Tercapainya Sinkronisasi pelaksanaan tugas DPRD.	1,279,922,700	493,318,750	129,164,000	109,104,900	84%	133,748,000	736,171,650	50%
		04	Rapat-rapat Paripurna	Terciptanya Sinergitas kebijakan DPRD dan Pemda.	158,565,000	54,514,250	65,896,000	49,841,000	75%	67,486,500	171,838,750	100%
		05	Reses	Terserapnya aspirasi masyarakat.	606,464,000	495,566,140	602,845,000	580,195,500	96%	594,530,000	1,670,291,640	270%
		06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terserapnya Aspirasi masyarakat.	822,757,000	43,768,000	79,686,000	21,592,250	27%	79,446,000	144,806,250	60%
		07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD.	3,854,772,650	3,574,306,840	2,750,301,250	2,635,555,824	95%	3,301,815,250	9,511,677,914	240%
		09	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Anggota DPRD	381,791,000	5,064,750	95,850,000	89,020,000	92%	127,945,000	222,029,750	50%

		10	Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.	356,944,700	327,166,400	441,542,500	441,497,500	99%	498,912,500	1,267,576,400	350%
		11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Laporan Kunjungan Kerja	10,457,516,000	10,036,724,175	8,089,497,700	7,634,017,500	94%	6,079,441,290	23,750,182,965	220%
		16	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	Terpublikasinya kegiatan DPRD	566,897,301	633,376,911	323,067,000	317,008,690	98%	786,215,000	1,736,600,601	300%
		18	Dokumentasi Kegiatan DPRD dan Penyediaan Bahan Bacaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan dokumentasi kegiatan DPRD	436,017,000	391,974,239	341,825,000	320,765,490	93%	-	712,739,729	160%
		17	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya wawasan dalam pelaksanaan Tupoksi penyelenggaraan Pemerintah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.	3,767,714,000	3,370,760,900	4,245,519,450	3,413,170,743	80%	3,387,245,400	10,171,177,093	260%
		19	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Persidangan DPRD	Tersedianya Aplikasi E-Persidangan	-	-	97,537,500	71,272,500	73%	20,000,000	91,272,500	912%
		20	Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan	Terpenuhinya fungsi DPRD dalam Anggaran dan Pengawasan.	-	-	2,023,430,500	1,691,606,150	83%	2,363,004,500	4,054,610,610	40.54%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Agam menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sesuai Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2018 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 91,27% dengan predikat kinerja tertinggi.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Agam ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Prosentase tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	95%	91%	92%	93%	94%	95%	93,88%	72,695%	91%	91.27%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM Daerah yang telah dirumuskan.

- a. masih adanya pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian;
- b. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai kebutuhan;
- c. tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang;
- d. tidak meratanya pembebanan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya *overlap* pekerjaan dan *idle* pekerjaan pada beberapa pegawai, serta tidak adanya *back up* jika terjadi sesuatu pada orang yang di beri tugas serta tanggungjawab; dan
- e. masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

Sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Sekretariat DPRD sebagai pembantu Bupati di bidang Sekretariatan DPRD, dengan berbagai masalah diatas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan pencapaiannya. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. adanya penempatan aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan/bidang tugasnya;
- b. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai di luar kelembagaan DPRD;
- c. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;

- d. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;
- e. sarana dan prasarana pendukung kesekretariatan masih terbatas atau belum mencukupi;
- f. adanya sifat individualistis dan kurangnya etika berorganisasi yang menghambat terjalannya kerjasama; dan

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan teknik analisis **SWOT** (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu suatu tehnik analisis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Lingkup internal meliputi :

1. Kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan;
2. Kelemahan (*Weaknesses*) yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi.

a. Lingkup eksternal meliputi :

1. Peluang (*Opportunities*) yaitu faktor-faktor diluar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.
2. Ancaman (*Threats*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara cermat dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam SKPD.

a. Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai tujuan.

Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

- a. tersedianya sarana kerja;
- b. tersedianya anggaran/dana; dan
- c. adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga gagal mencapai sasaran.

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

- masih adanya pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi;
- adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi, sosial budaya, ekologi dan keamanan.

a. Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung dalam mencapai sasaran adalah :

1. adanya upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan disiplin;
2. adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD.

b. Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah :

1. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai diluar kelembagaan DPRD;
2. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja; dan
3. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta landasan kritis dalam penyusunan rencana strategik instansi, sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja tahunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan efisiensi anggaran tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan standar operasional pelayanan Sekretariat DPRD yang baru untuk menggantikan standar operasional pelayanan yang lama dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pemerintah daerah. Disamping itu review terhadap rancangan awal RKPD juga menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Perbedaan setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD disebabkan oleh beberapa hal seperti beberapa peristiwa yang akan

dilaksanakan tahun yang akan datang, perubahan SHBJ, perubahan kebijakan dan lain-lain.

Perubahan – perubahan yang terjadi untuk rancangan awal RKPD tahun 2020 setelah dilakukan review terhadap kebutuhan disebabkan oleh :

1. adanya sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan yang sudah rusak;
2. adanya perubahan SHBJ;
3. adanya kebijakan untuk belanja dengan sistem pembayaran non tunai;
4. adanya kenaikan harga, dan lain-lain.

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2020
Kabupaten Agam

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.739.591,330	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	12 bulan	389.400.000	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	118.144.480	
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Singkronisasi Program Jasa Perkantoran	2 bulan	1.367.582.700	
4	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran					Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Jasa Perkantoran	12 bulan	567.753.450	
5	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran					Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Sekretariat DPRD	Lancarnya Operasional Perkantoran	12 bulan	1.993.489.100	

6	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan				Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Sekretariat DPRD	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penatausahaan dan Pertanggungjawaba n Keuangan	12 bulan	303.221.600	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.300.000,00	
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Lubuk Basung	Terpenuhinya Peralatan Rumah Dinas	14 Jenis	150.000.000	
2	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	900.000.000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana				Pengadaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana kantor	12 bulan	250.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				24.730.118,612	
1	Pembahasan Ranperda				Pembahasan Ranperda	Dalam Daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam Dalam provinsi dan Luar provinsi Sumbar	Tersedianya Produk hukum daerah	14 Perda	3.724.242.700	
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama				Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Kab. Agam dan Luar Daerah dalam provinsi	Tercapainya Intensitas Komunikasi dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	102.197.750	

3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan			Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kab. Agam	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 bulan	167.185.000
4	Rapat-Rapat Paripurna			Rapat-Rapat Paripurna	Kab. Agam	Terciptanya Sinergitas Kebijakan DPRD dan Pemda	12 bulan	84.354.375
5	Reses			Reses	Kab. Agam	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	kali	984.931.000
6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kab. Agam	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	12 bulan	99.307.500
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah Dalam Provinsi Dan luar provinsi	Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD	kali	3.631.996.775
8	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Anggota DPRD	Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Sekretraiat DPRD	12 bulan	175.000.000
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Luar Daerah	Laporan Kunjungan Kerja	12 bulan	7.599.301.612
10	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD			Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	Kab. Agam dan Luar Daerah dalam Provinsi	Terpublikasinya Kegiatan DPRD	12 bulan	943.458.000
11	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD			Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	Meningkatnya wawasan dalam pelaksanaan Tupoksi penyelenggaraan pemerintah bagi Pimpinan dan	12 bulan	4.236.926.450

12	Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan				Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan	Kab. Agam dan Luar Daerah	Anggota DPRD Terpenuhiya fungsi DPRD dalam Anggaran dan Pengawasan	12 bulan	2.599.304.950
13	Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD				Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	180 stel	381.912.500
JUMLAH									30.769.709.942

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang bertugas sebagai fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berarti Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan Masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sekretariat DPRD adalah SKPD yang seperti SKPD lainnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD mengemban peran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka tentu dituntut mempunyai profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dari sisi teknis maupun operasionalnya.

Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Hal itu dimulai dari proses penyelenggaraan kesekretariatan, penyelenggaraan rapat dan risalah serta penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan ketatusahaan. Tujuan :

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD;
2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
3. meningkatkan penguasaan komunikasi, informasi dan teknologi.

Sasaran :

1. peningkatan kualitas dan profesionalitas kinerja aparatur;
2. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;
3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
4. peningkatan fasilitas dan pengembangan komunikasi, informasi dan teknologi.

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Membuat rencana program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD penjabaran dari Rencana Strategis lima tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahwa untuk terwujudnya Sasaran pada Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD harus menyusun program sesuai tugas pokok yang akan dijabarkan menjadi kegiatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan DPRD pada Tahun 2020 terdiri dari 3 Program dan 22 Kegiatan.

1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari :

- a. Program Strategis, yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah.
- b. Program Penunjang (Rutin) :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
5. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
7. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
8. Rehabilitasi Sedang/Berang Gedung Kantor
9. Pengadaan Sarana Prasarana
10. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
11. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
12. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
13. Rapat-Rapat Paripurna
14. Kegiatan Reses
15. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
16. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
18. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
19. Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
20. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD
21. Fasilitasi Pembahasan Anggaran Pengawasan
22. Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Pada Bab-Bab terdahulu, telah dijabarkan hasil evaluasi Pelaksana Renja Tahun lalu dan capaian Renstra OPD dan pada bab ini akan dijabarkan indikator, target kinerja program dan kegiatan pelayanan dan menghitung kebutuhan satuan kegiatan, mencantumkan dana indikatif tahun rencana dan pagu indikatif tahunberikutnya sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4
PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
SUMBER DANA APBD

Organisasi / SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Alokasi Dana APBD		Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	(Rp.000,-)	(Rp.000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
	PROGRAM														
3.01.02.02.3. 01.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabili tas Kinerja Pemerinta h Daerah Meningkat		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran							APB D	SETWAN	Sedang berjalan	

3.01.02.02.3. 01.02.02.01.0 2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sekretariat DPRD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	100%	389.400.000	428.340.000	APBD	SETWAN
3.01.02.02.3. 01.02.02.01.1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Sekretariat DPRD	Terwujudnya Pelayanan Operasional Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	118.144.480	129.958.928		
3.01.02.02.3. 01.02.02.01.1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Sekretariat DPRD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 kali	Terwujudnya Singkronisasi Program Jasa Perkantoran	100%	1.367.582.700	1.504.340.970		
3.01.02.02.3. 01.02.02.01.2 0	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran		Sekretariat DPRD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	12 bulan	Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Jasa Perkantoran	100%	567.753.450	624.528.795		
3.01.02.02.3. 01.02.02.01.2 1	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran		Sekretariat DPRD	Rasio Kebutuhan Jasa Perkantoran	Terseainya Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	12 bulan	Lancarnya Operasional Perkantoran	90%	1.993.489.100	2.192.838.010		

3.01.02.02.3.01.02.02.01.28	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan		Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	12 bulan	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan		303.221.600	333.543.760		
3.01.02.02.3.01.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
3.01.02.02.3.01.02.02.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas	unit/macam	Terpenuhiya Peralatan Rumah Dinas	100%	150.000.000	165.000.000		
3.01.02.02.3.01.02.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif	100%	900.000.000	990.000.000		
3.01.02.02.3.01.02.02.02.46	Pengadaan Sarana dan Prasarana			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	9 jenis	Terpenuhiya Kebutuhan Sarana Prasarana kantor	100%	250.000.000	275.000.000		
3.01.02.02.3.01.02.02.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
3.01.02.02.3.01.02.02.15.08	Pembahasan Ranperda			Persentase Ranperda	Jumlah Ranperda	2 ranperda	Tersedianya Produk	90%	3.724.242.700	4.096.666.970		

1				yang disahkan menjadi Perda	dan peraturan/keputusan DPRD yang ditetapkan		hukum daerah						
3.01.02.02.3.01.02.02.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama			Persentase agenda kerja daerah dan DPRD yang terlaksana tepat waktu	Terlaksananya Hearing dan Rapat Kerja	200 pertemuan	Tercapainya Intensitas Komunikasi dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat	75%	102.197.750		112.417.525		
3.01.02.02.3.01.02.02.15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan			Jumlah Keputusan Politik	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan	60 kali	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas DPRD	95%	167.185.000		183.903.500		
3.01.02.02.3.01.02.02.15.04	Rapat-Rapat Paripurna			Jumlah Keputusan Politik DPRD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna	65 kali	Terciptanya Sinergitas Kebijakan DPRD dan Pemda	100%	84.354.375		92.793.113		
3.01.02.02.3.01.02.02.15.05	Reses			Jumlah Keputusan Politik	Kegiatan Reses DPRD	3 kali reses/1xperdapi, 2xperorangan	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	106 laporan	984.931.000		1.083.424.100		
3.01.02.02.3.01.02.02.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			Jumlah Keputusan Politik	Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah	5 kali	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	95%	99.307.500		109.238.250		

3.01.02.02.3. 01.02.02.15.0 7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Jumlah Keputusan Politik	Terselenggar anya bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD	45 orang, 7 kali	Meningkatn ya Kapasitas Anggota DPRD	100%	3.631.996.775	3.995.196.453		
3.01.02.02.3. 01.02.02.15.0 9	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Jumlah Keputusan Politik	Terlaksanan ya General Chek Up Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga	45 orang	Diketahui Kondisi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga	100%	175.000.000	192.500.000		
3.01.02.02.3. 01.02.02.15.1 1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah			Jumlah Keputusan Politik	Terselenggar annya Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi	5 kali LDDP, 4 kali LDLP	Laporan Kunjungan Kerja	9 Lapora n	7.599.301.612	8.359.231.774		
3.01.02.02.3. 01.02.02.15.1 6	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD			Jumlah Keputusan Politik	Jumlah Terpublikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	564 kali	Terpublikasi nya Kegiatan DPRD Agama	100%	943.458.000	1.037.803.800		
3.01.02.02.3. 01.02.02.15.1 7	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD			Jumlah Keputusan Politik	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Luar Provinsi (Studi Banding)	4 kali luar daerah luar provinsi/ang gota	Meningkatn ya wawasan dalam pelaksanaan Tupoksi penyelengg araan pemerintah bagi Pimpinan dan	95%	4.236.926.450	4.660.619.095		

3.01.02.02.3.01.02.02.15.20	Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan			Jumlah Keputusan Politik	Terfasilitasi ya Rapat Pembahasan Anggaran dan Pengawasan	12 kali	Anggota DPRD Terpenuhi ya fungsi DPRD dalam pembahasan Anggaran dan Pengawasan	100%	2.599.304.950	2.859.235.445				
3.01.02.02.3.01.02.02.15.21	Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD			Jumlah Keputusan Politik	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	270 stel	Terpenuhi ya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	381.912.500	420.103.750				
JUMLAH														

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dilingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020. Renja Sekretariat DPRD tahun 2020 mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Agam. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Agam tahun 2020. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM

INDRA.S Sos, MAP
NIP. 19710404 198901 1 001